



JURNAL REINHA

SEKOLAH TINGGI PASTORAL REINHA LARANTUKA

KAJIAN TEOLOGI DAN PASTORAL

Vol. VIII, Thn. VI. Edisi Januari - Juni 2018

TELAAH YURIDIS-PASTORAL MENYANGKUT PENDAMPINGAN UMAT
YANG KAWIN - CERAI - KAWIN LAGI

Dr. Rikardus Jehau

"TENT-MAKING MISIONARY" SEBUAH IMPLIKASI MENYIKAPI TANDA ZAMAN

Benedikta Y. Kebingin, S. Pd., Lic. Theol.

PERSETUBUHAN DALAM KONTEKS PERKAWINAN KRISTIANI

Zepto Triffon Oktaviano Polii, SS., M. HUM.

ALMA PUTERI DAN GEREJA LOKAL

Teresia Noiman Derung, S. Pd., M. Th.

KONSELING PASTORAL KELUARGA SEBAGAI PENDEKATAN PASTORAL PRAKSIS
DALAM MENGATASI PROBLEMATIK KELUARGA KATOLIK DI PAROKI
KRISTUS RAJA WOLOTULO KEVIKEPAN ENDE KEUSKUPAN AGUNG ENDE

Paulinus Tibo, M. Th.

SEBUAH REFLEKSI PASTORAL INKULTURASI BUDAYA JAWA DALAM PENGHAYATAN
IMAN KATOLIK IMPLIKASINYA DALAM KEGIATAN MISA JUMAT LEGI

Rosalia Wiwin, S. Ag., M. Th.

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN ETIKA TERHADAP ORGANIZATIONAL
CITIZENSHIP BEHAVIOUR (OCB) GURU SMAN DI KABUPATEN FLORES TIMUR

Hermania Bhoki, Alfonsus Mudi Aran, dan Petrus Tukan

GEREJA KATOLIK SEBAGAI BUAYA TANDING: REFLEKSI KRITIS POLA REKRUTMEN
AGEN PASTORAL DI NTT

Krisantus Minggu Kwen

KELUARGA SEBAGAI PENDIDIK DASAR TERHADAP ANAK DALAM
PENGEMBANGAN IMAN DAN SPIRITUALITAS

Viktoria Leiboy

PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PROGRAM PEMBIASAAN DALAM TERANG
GRAVISSIMUM EDUCATIONIS SEBAGAI JAWABAN AKAN
KEBUTUHAN LOKAL

Vinsensius Bawa Toron dan Yohanes M. Niga

**MENJADI GEREJA YANG
MANDIRI DAN MISIONER**

DAFTAR ISI

TELAAH YURIDIS-PASTORAL MENYANGKUT PENDAMPINGAN UMAT YANG KAWIN-CERAI-KAWIN LAGI Dr. Rikardus Jehaut.....	13
“TENT-MAKING MISIONARY” SEBUAH IMPLIKASI MENYIKAPI TANDA ZAMAN Benedikta Y. Kedingin, S. Pd., Lic. Theol.....	31
PERSETUBUHAN DALAM KONTEKS PERKAWINAN KRISTIANI Zepto Triffon Oktaviano Polii, SS., M. HUM.	51
ALMA PUTERI DAN GEREJA LOKAL Teresia Noiman Derung, S. Pd., M. Th.....	81
KONSELING PASTORAL KELUARGA SEBAGAI PENDEKATAN PASTORAL PRAKSIS DALAM MENGATASI PROBLEMATIK KELUARGA KATOLIK DI PAROKI KRISTUS RAJA WOLOTOLO KEVIKEPAN ENDE KEUSKUPAN AGUNG ENDE Paulinus Tibo, M. Th.	97
SEBUAH REFLEKSI PASTORAL INKULTURASI BUDAYA JAWA DALAM PENGHAYATAN IMAN KATOLIK IMPLIKASINYA DALAM KEGIATAN MISA JUMÁT LEGI Rosalia Wiwin	147

**PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN ETIKA
TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP
BEHAVIOUR (OCB) GURU SMAN DI KABUPATEN
FLORES TIMUR**

Hermania Bhoki, Alfonsus Mudi Aran, dan Petrus Tukan 167

**GEREJA KATOLIK SEBAGAI BUDAYA TANDING:
REFLEKSI KRITIS POLA REKRUTMEN AGEN
PASTORAL DI NTT**

Krisantus Minggu Kwen 203

**KELUARGA SEBAGAI PENDIDIK DASAR TERHADAP
ANAK DALAM PENGEMBANGAN IMAN DAN
SPIRITUALITAS**

Viktoria Lelboy 221

**PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PROGRAM
PEMBIASAAN DALAM TERANG *GRAVISSIMUM*
EDUCATIONIS SEBAGAI JAWABAN AKAN
KEBUTUHAN LOKAL**

Vinsensius Bawa Toron dan Yohanes M. Niga 233

GEREJA KATOLIK SEBAGAI BUDAYA TANDING: REFLEKSI KRITIS POLA REKRUTMEN AGEN PASTORAL DI NTT

Krisantus Minggu Kwen

ABSTRAK

Kehadiran tenaga kerja pastoral atau lasim disebut agen pastoral merupakan kebutuhan di sebuah wilayah Gerejani, termasuk di wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Tenaga pastoral menjadi bagian dari karya Gereja di tengah dunia. Mereka ikut menentukan wajah Gereja di masa depan. Perekrutan agen pastoral perlu mendapat perhatian serius agar karya pewartaan dapat diterima oleh umat dan masyarakat. Untuk itu penulis menunjukkan secara kritis relevansi hubungan antara pola rekrutmen dengan kondisi kemasyarakatan yang melatari kehadiran Gereja. Gereja hendaknya hadir sebagai budaya tanding ketika terjadi kekerasan kolektif dan ketidakadilan secara terstruktur di tengah masyarakat kita. Gereja melalui para agen pastoral dapat membawa budaya tanding yang mendorong keadilan, cinta kasih, dan perdamaian dimana wajah Allah harus dirasakan oleh umat dan masyarakat yang dilayani oleh agen pastoral.

Kata-kata kunci: budaya tanding, rekrutmen, agen pastoral

1. LATAR BELAKANG

Sejarah bangsa-bangsa mencatat bahwa salah satu faktor yang ikut menentukan perubahan tatanan masyarakat dipengaruhi oleh kebijakan politik yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Dampak dari keputusan tersebut memberikan efek signifikan kepada perubahan dalam masyarakat. Ketika bangsa Eropa mulai mengalami perubahan pada akhir abad pertengahan menuju dunia modern, Raja Hendry VIII mengambil sikap progresif untuk mengambil alih pimpinan Gereja Inggris dan

mengendalikannya.²¹⁷ Hendry VIII mengambil sikap melawan Gereja Katolik berdasarkan pilihan politik karena kuatnya ambisi pribadi²¹⁸ yang tidak diakomodir oleh Gereja Katolik. Ketika itu Thomas More muncul sebagai penjaga wibawa moral Gereja Katolik. Ia membela kesatuan Gereja karena menurutnya hukum lokal dan nasional harus tunduk kepada hukum universal. Yakni prinsip etisnya dijamin oleh kesatuan Gereja dan keutuhan tradisi. Tomas yakin bahwa masyarakat Etis adalah menghidupi norma yang diturunkan sepanjang zaman oleh Gereja Kristus dan diterapkan dalam bentuk hukum dan aturan. Prinsip etisnya yang kuat serta keutuhan moral kristiani yang tak tergoyahkan menghadapkan Hendry pada kematian yang mengagumkan ditangan algojo.

Di aras nasional kita tentu ingat Gereja Katolik Indonesia pernah *sempoyongan* ketika gong surat sakti SK No. 70/1978 dan SK No. 77/1978 dibunyikan oleh pemerintah Indonesia. Masing-masing tentang penyiaran agama dan bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Menteri Agama. Kemudian menyusul Surat Keputusan Bersama (SKB) No.1/1979. Dampaknya adalah tenaga-tenaga misionaris luar negeri diperkurang masuk ke Indonesia karena sebagian visa misionaris asing tidak diperpanjang dan tenaga kerja asing yang baru sudah sulit memperoleh Visa. Momentum itu telah mendorong Gereja Indonesia untuk mewujudkan semangat Konsili Vatikan II. Badan-badan kepemimpinan dan tata kelola Gereja baik di Paroki, Lingkungan, dan Stasi sudah terbuka bagi kelompok awam.²¹⁹ Gereja katolik Indonesia sadar bahwa ia harus mengambil langkah antisipatif terhadap perubahan dalam pola hidup menggereja yang masih tergantung pada bantuan penderma luar negeri karena peran misionaris asing. Untuk itu Gereja Katolik di NTT yang masih banyak dipengaruhi oleh peran para misionaris asing mulai menyiapkan sebuah tahapan untuk menyiapkan para tenaga pastoral

²¹⁷ John Mansford Prior, SVD, *Tolak Tunduk : Harga Sebuah Nurani*, dalam *Mengabdikan Kebenaran*, (Maumere : Ledalero, 2005), p. 267-277.

²¹⁸ Hendry VIII memilih menikah lagi dengan kekasihnya Anne untuk mendapatkan keturunan sebab istri sahnya, Catherine, ternyata mandul. Gereja Katolik menolak permintaannya karena sifat perkawinan Katolik yang monogam dan takterceraikan.

²¹⁹ John Mansford Prior, SVD, *Antara Monarki dan Demokrasi: Melacak Jejak laka Hirarki Gereja 40 Tahun Terakhir*, dalam Paul Budi Kleden, Otto Gusti Madung, Anselmus meo, *Allah Menggugat Allah Menyembuhkan* (Maumere:Ledalero, 2012), p. 101-102.

tertahbis dan tak tertabis untuk dapat mengambil peran dalam wilayah gerejani.

Dua kasus dengan dua pilihan yang berbeda namun memiliki kesamaan. Pertama, Gereja Katolik dalam diri Thomas More dan para pemimpin Gereja Indonesia telah membuat pilihan yakni menentukan jatidiri Gereja. Thomas More²²⁰ menentukan sikap etis moral yang mengagumkan, sementara Gereja Katolik Indonesia mengambil sikap mandiri dan keluar dari tingkat ketergantungan terhadap bantuan dari luar. Kedua, sikap kepemimpinan yang tegas dan berani sangat dibutuhkan dalam membangun umat dan masyarakat. Pertanyaan kunci adalah Pemimpin macam manakah yang harus dilahirkan dari rahim Gereja Katolik di NTT yang sedang bertumbuh dalam aras pembangunan modern saat ini? Masyarakat membutuhkan keteladanan dari para pemimpin Gerejaanya. Figur keteladanan ini menjadi sangat berarti ketika masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin masyarakatnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang masih bisa diharapkan dari para pemimpin kita? Korupsi ada dalam setiap lembaga pemerintah. Secara publik, mungkinkah ada kolusi di dalam tubuh Gereja Katolik NTT? Sementara itu para elit pemerintah sedang mempertontonkan budaya tidak rasa malu. Para oknum DPRD ramai-ramai menjadi makelar proyek, demikian banyak berita yang menghiasi wajah Koran dan tabloid di NTT.

Dalam problematik perilaku elit masyarakat tersebut kemudian muncul pertanyaan susulan sejauhmana peran pemimpin pastoral Gereja agar dapat menyiapkan pola rekrutmen tenaga-tenaga pastoral di wilayah Indonesia? Dalam seluruh proses itu, umat kita akan disiapkan untuk lebih mandiri, berpartisipasi, dan lebih bertanggung jawab atas nasib serta lebih siap menegakkan kebenaran. Dengan demikian perubahan yang dikehendaki adalah perubahan Gereja yang benar-benar bertumbuh

²²⁰ Menyebut Thomas More sebagai contoh dari sikap moral profetis yang tegas nan berkorban, tidak dimaksud mengeliminir peran tokoh dikalangan Gereja Katolik Indonesia baik tertahbis maupun tak tertahbis. Para tokoh Gereja di Indonesia dalam hidupnya juga sudah memainkan peran strategisnya yang patut diteladani. Untuk disebutkan disini misalnya: IJ. Kasimo, Frans Seda, Slamet Riyadi, Mgr. Soegiyapranoto dan lainnya.

menjadi budaya tanding ketika segala karya nampak sia-sia karena peran publik Gereja semakin kurang diperhitungkan.

2. MENYIAPKAN TENAGA PASTORAL DI NTT SEBAGAI BUDAYA TANDING

Untuk menyiapkan pemimpin Gereja NTT masa depan, baik terahbis maupun non terahbis membutuhkan proses waktu dan akan menyerap banyak energi. Namun itikad baik harus dilandasi oleh kesungguhan untuk melihat realitas secara jujur dan proporsional. Demikianpun Gereja Katolik NTT harus terbuka terhadap perubahan, apalagi jika perubahan itu adalah sebuah kebutuhan yang datang dari panggilan Allah sendiri. Konsili Vatikan II telah membuka wawasan dan cara pandang baru bahwa keterlibatan Gereja terlahir dari permasalahan keadilan sosial yang dialami oleh umat manusia.²²¹ Perlu disadari bahwa Gereja adalah salah satu unsur yang membentuk masyarakat karena Gereja ada di tengah masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan keterlibatan sosial Gereja dalam seluruh proses pembangunan dimana perannya dibutuhkan. Hal ini membentuk dua ciri itikad keterlibatan Gereja.²²² Pertama keterlibatan sosial gereja itu bersifat tetap. Karena senantiasa sama dalam asas-asasnya yang paling mendasar, dalam prinsip-prinsip refleksinya, dalam norma-norma penilaiannya, dalam pedoman dasar untuk bertindak dan terpenting adalah persatuan yang vital dengan Injil. Kedua, keterlibatan sosial Gereja itu selalu baru karena tanggap dengan situasi zaman yang selalu berganti dan dengan berbagai perubahan dalam masyarakat. Kesiapan dan sigap Gereja ini menjadi pegangan untuk pemimpin Gereja ke depan agar Gereja dapat siap menjawab kebutuhan jaman. Ketiga, keterlibatan Gereja melalui teologi kontekstual²²³ dengan refleksi yang mendalam dimulai dengan pengalaman iman yang dihayati dalam konteks sejarah dan budaya

²²¹Bdk. Paus Yohanes paulus II, *Ensiklik Quadragesimo Anno*, terj. R. Hardawiryana, Jakarta: Departemen Dokumen dan Penerangan KWI, 1992.

²²²Koerniatmanto Soetoprawiro, *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme* (Yogyakarta: Kanisius, 2003) p. 57.

²²³John M. Prior, Teologi Kontekstual apakah mungkin?, *Jurnal Ledalero*, Vol.9.No.2, tahun 2011. P. 53.

tertentu kemudian berdasarkan pengalaman tersebut mempertanyakan tradisi iman.

2.1. Wajah Indonesia yang Suram

Kita dapat meneropong NTT dengan sungguh niscaya memandangi Indonesia sebagai bingkai kesatuan. Apa yang menjadi wajah NTT sesungguhnya adalah apa yang menjadi wajah Indonesia sebenarnya. Salah satu tampilan kejahatan yang sering muncul ditengah air adalah wajah kekerasan. Dengan gamblang media Indonesia menampilkan wajah kekerasan kolektif dengan berbagai muatan sosial-politik. Peristiwa agresivitas massa yang kemudian berkembang menjadi kerusuhan seperti yang terjadi di berbagai belahan Indonesia. Faktor ketidakadilan struktural yang melahirkan adanya deprivasi terbatas (*relative deprivation*) sebagai akibat adanya kesenjangan antara nilai yang diharapkan dan (*value expectations*) dengan nilai kemampuan (*value capabilities*). Karena ini adalah faktor dasar yang membentuk berbagai bentuk frustrasi sosial ataupun ketidakadilan sosial.²²⁴ Untuk menghadapi situasi agresivitas massa ini, upaya dan penegakkan supremasi hukum saja tidak cukup. Strategis dan kebijaksanaan untuk menangkali kerusuhan massa juga tidak boleh melupakan tahap pemulihan dengan mengurangi *relative deprivation*, mengembangkan pola *good governance*, mengembangkan mekanisme dan komunikasi politik yang lebih terbuka, dan menumbuhkan budaya anti kekerasan. Yang terpenting adalah dalam seluruh proses penangkalan kekerasan terstruktur itu merupakan bagian dari proses pencerdasan kehidupan bangsa dan proses pemberdayaan masyarakat.

2.2. Pola rekrutmen tenaga pastoral kita dalam wilayah paling korup²²⁵

Membaca dan menimbang NTT, menghadapkan pada kenyataan antara harapan dan realitas. Menentukan pola kepemimpinan Pastoral

²²⁴Mulyana W. Kusuma, *Tegaknya Supremasi Hukum: terjebak antara Memilih Hukum dan Demokrasi*, (Bandung : PT. Remaja Rostakarya, 2002), p. 96-99.

²²⁵Max Regus Pr, *Menembus Era Kemurungan: Kisah sebuah negeri dengan Amnesia Kronis*. (Maumere: Ledalero, 2007).p. 84. -

harus berangkat dari realita-realita sosial kemasyarakatan. Dengan demikian tidak mengulur perhatian tanpa mengenal orang yang dilayani. Membidik pelayanan yang membumi, merakyat. Coba kita mengangkat muka dan melihat cerita sukses putera-puteri NTT di tanah rantau. Ada sejumlah fenomena putera-puteri NTT di berbagai pelosok tanah air, terlebih ketika pemerintah NTT dengan bangga menyebut angka-angka statistik devisa yang masuk ke kantong Bank-Bank Negara dan swasta. Namun ironis sekali bahwa ternyata pemerintah tidak sanggup mencari solusi-solusi alternatif untuk menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang terpaksa pergi merantau menjadi TKI di Luar Negeri. Justru tanpa sengaja pemerintah mendepak rakyat biasa dan mendiskreditkan mereka di ruang pembangunan.²²⁶ Cerita sukses memang masih membayang, namun kita juga terkenang memori pilu, namun serentak tak terhindarkan. Cerita miris derita para TKW dan TKI NTT yang dianiaya dan juga nyaris ditelantarkan karena telah direkrut secara ilegal oleh oknum-oknum PJTKI tak bertanggung jawab.²²⁷

Kewaspadaan Gereja harus tetap terjaga agar mentalitas pola kesalahan penguasa dan model calo-calo TKI tidak menjadi virus yang merasuki mentalitas agen pastoral. Sebab rambu-rambu hendak disodorkan kepada para tenaga-tenaga pastoral karena mereka bekerja bukan lagi berdasarkan orientasi pelayanan, melainkan bekerja berdasarkan nilai guna. Anda dan saya dihargai sejauh mempunyai nilai ekonomis. Semuanya sudah diukur berdasarkan sistim kapitalis, pembuat keputusan ekonomi menurut asumsi-asumsi kompetitif pasar bebas.²²⁸ Sebuah pilihan mendesak bagi Gereja di NTT untuk mulai memikirkan

²²⁶ Inosentius Mansur, *Perantauan antara Harapan dan realitas*, dalam Biduk Edisi 1 XLX Juli-Desember. 2011. P. 12.

²²⁷ Publik NTT masih tersayat perasaannya tatkala kasus penganiayaan Nirmala Bonat, Masyarakat NTT dikejutkan lagi dengan berita 300 Calon TKW asal NTT Menangis di Kantor Cabang dan penampungan PT MMJA (Mitra Makmur jaya Abadi). Berita ini muncul di televisi nasional. Harian Pos Kupang tanggal 17/18/19/20/21 Februari 2010 secara eksklusif telah mengulas pemberitaan secara bersambung dengan berbagai laporan reportasenya. 300 calon tenaga kerja ini meratap karena lebih dari empat bulan berada dalam ketidak pastian – belum berangkat. Kemudian penjelasan oleh Wakil Kepala Cabang MMJA, Edy Thalib bahwa jumlahnya bukan 300 melainkan 235 orang.

²²⁸ Kevin P. Clements, *Teori pembangunan : dari kiri ke kanan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009). P. 22.

apa yang dapat dikerjakan untuk melawan pola-pola destruktif demikian, agar dapat terhindar dari gurita kapitalisme.

2.3. Problem Sumber Daya Manusia NTT

NTT memang kaya akan sumber daya alam dan vitalitas manusia yang energik. Jika NTT berada dalam sentuhan tangan pemimpin yang tepat, niscaya akan dapat mengubahnya wilayah ini menjadi Propinsi yang makmur untuk menyejahterakan rakyatnya. Sebuah penelitian metodologi²²⁹ telah ikut menggambarkan problematik pengembangan sumber daya manusia. Pertama, tersedianya tenaga ahli dan trampil yang siap bekerja sesuai dengan bidangnya. Kedua, kinerja manajemen SDM yang bertugas menyaring tenaga kerja diharapkan mampu menetapkan program pelatihan kerja dan meningkatkan program ketrampilan tenaga kerja untuk mencapai hasil atau prestasi yang maksimal. Ketiga, tersedianya lapangan kerja yang sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan tenaga kerja. Dalam penelitian tersebut justru ditemukan ketimpangan antara ketersediaan lapangan kerja berbanding terbalik dengan dasar keahlian tenaga kerja. Ada harapan responden agar tenaga kerja tamatan STKIP jangan bekerja di kantor DPRD. Mereka tidak akan tahu apa yang dikerjakan, sebaliknya akan menghabiskan waktu tanpa dapat berbuat apa-apa, akhirnya akhir bulan terima gaji penuh.

Adapun dalam penelitian yang sama tentang minat baca ditemukan problematik seputar *up to date* bahan bacaan baik buku maupun majalah dan Koran. Kita benar-benar ketinggalan dalam mengakses informasi. Bahkan kurang dari 5 % orang NTT yang membaca Koran dan surat kabar lainnya.²³⁰ Ketika jumlah penderita HIV/AIDS makin meningkat, Pemerintah perlu menyiapkan metode yang efektif. Diperlukan pemecahan masalah yang akurat, tidak hanya sekedar membagi-bagi kondom untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Sosialisasi dampak penyakit HIV/AIDS lebih penting untuk mendorong

²²⁹Justin L. Wejak, *Sumber Daya Manusia NTT Rendah?: Tantangan dan Jawaban*, dalam Paul Budi Kleden, Robert Mirsel (ed), *Menerobos Batas Merobohkan Prasangka* (Maukere: Ledalero, 2011). P. 185-188.

²³⁰ Ibid. p. 189.

tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit tersebut.²³¹ Ditengah majunya pembangunan, dan peningkatan peralatan medis di rumah-rumah sakit, *de facto* masih banyak orang NTT yang pergi ke dukun untuk mencari penyembuhan. Ini fenomena menarik, bahwa tentunya penyembuhan oleh dukun tidak selalu berhasil, dan metode penyembuhan modern tidak selalu gagal, namun pergi ke dukun ternyata masih sebuah pilihan.²³²

Beragam problem dan intensitas permasalahan di NTT membutuhkan penanganan dan kebijakan yang tepat sasaran dan berdaya guna. Ini penting agar usaha dan penataan secara kelembagaan di tingkat institusi baik negara maupun keagamaan tidak sekedar parsial. Itu hanya terkesan menghambur-hamburkan uang tanpa ada *sense of crisis* permasalahan dan sekedar menjalankan rutinas formal untuk sekedar menghabiskan anggaran pada akhir masa jabatan atau sekedar dinilai ada program. Jika mentalitas ini yang dominan, implementasi pemberdayaan seperti jauh panggang dari api. Yang dibutuhkan sekarang adalah pemimpin karismatik yang pro rakyat. Dia harus berani membela kepentingan rakyat di tengah arus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang mendera bangsa dan persada NTT.

2.4. Gereja: Peluang atau Batu Sandungan?

Siapapun memahami bahwa tantangan besar Gereja Katolik NTT ke depan adalah sanggup menjadi agen perubahan, *agent of change*, jika Gereja sebagai sebuah lembaga tidak mau dinilai menjadi beban dalam masyarakat. Sampai dengan saat ini pada umumnya Gereja masih dipercaya publik NTT sebagai *mercusuar* bagi pencari keadilan dan kebenaran. Kita bersyukur bahwa disetiap keuskupan mempunyai komisi-komisi yang berfungsi untuk menjadi mediator dan mediasi bagi pengejawantahan dari pewartaan akan sabda Tuhan, disamping itu untuk menyokong kegiatan publik di tengah masyarakat. Baik itu kegiatan yang mengatur gerak internal Gereja misalnya komisi Kitab Suci dan Liturgi, maupun kegiatan yang menyangkut Gereja keluar seperti Komisi Antaumat beragama dan Buruh Migran. Melihat betapa muliahnya tingkat

²³¹ Ibid. p. 190.

²³² Ibid. p. 191.

kepercayaan publik dan rasa hormat umat kepada Gereja, maka terbersit suatu harapan yang kuat akan kesempatan untuk lebih menunjukkan komitmen Gereja untuk tegar dan kuat membela umat. Namun dalam kepercayaan itu sekaligus menyimpan beban moral yang besar untuk membuktikan konsistensi Gereja terhadap masyarakat dan umat Katolik. Jika Gereja berjuang untuk membawa keadilan, maka Gereja harus menjadi panglima untuk menunjukkan contoh yang baik dan benar. Segala yang kita lakukan dengan sendirinya teruji oleh waktu. Sebab siapa dan apapun yang kita lakukan mencerminkan siapa sebenarnya kita.

Melalui media televise, surat kabar dan media elektronik kita dapat membaca dan melihat beragam peristiwa negatif dibidang sosial, politik, ekonomi dan agama di NTT yang melibatkan para oknum pemimpin. Penyalagunaan jabatan dan wewenang telah mengantar banyak pejabat pemerintah baik aktif dan yang purna tugas (pensiun) ke balik terali besi alias penjara. Peristiwa-peristiwa demikian makin mengokohkan betapa rapuhnya komitmen sebagian pemimpin NTT. Akibat dari citra buruk yang dipertontonkan oleh banyak oknum pejabat tersebut telah menurunkan wibawa dan citra pemimpin yang ideal. Generasi sekarang sedang mengalami krisis kepercayaan akibat dari tindak-tanduk negatif dari oknum pemimpin sekarang. Bukan tidak mungkin akan tiba waktunya bahwa fenomena ini akan merebak dan merobek situasi batin dan merasuki wilayah keagamaan. Dan jika para pemimpin pastoral kita tidak hati-hati akan terjebak mendukung pastoral model pencitraan. Umat membutuhkan *figur* yang *concern* dan memiliki kapasitas pribadi dan kedalaman rohani seorang pemimpin. Oleh karena itu keteladan hidup menjadi ukuran bukan bersembunyi dibalik pencitraan yang palsu. Jika *performa* ideal diatas tidak sanggup dipenuhi para pemimpin, maka sekurang-kurangnya para pemimpin hendaknya jangan hanya menjadi batu sandungan bagi umatnya.

3. MENCARI ORIENTASI BARU TENAGA PASTORAL GEREJA DI NTT

3.1. Mewaspada mentalitas Kontrakonsili Vatikan II

Hemat saya, penelusuran pola perekrutan tenaga pastoral di NTT belum lengkap tanpa membedah secara ringkas apa yang menjadi jiwa

dari *performa* reformasi pasca Konsili Vatikan II. Karena melalui konsili Vatikan II wajah Allah menjadi lebih manusiawi, merangkul dan memerdekakan umat manusia. Refleksi atas iman ini penting untuk mengetahui konsistensi kita terhadap pewartaan sabda Allah, jiwa setiap karya pastoral. Karena program dan pembaruan tanpa didukung mentalitas pemimpin yang mumpuni, maka pengorbanan akan tampak sia-sia. Lagi pula, jangan sampai terjadi bahwa Gereja terlalu menghadirkan wajah Allah yang lebih klerikal (Gereja Institusi) dan menyembunyikan Allah dibalik tembok-tembok Gereja dan biara.

3.1.1. Gereja Persekutuan

Konsili Vatikan II telah mendorong Gereja untuk memperbaiki Gereja secara mendalam dengan menjadikan Gereja sebagai persekutuan antaranggota dengan fungsi dan kharisma berbeda-beda daripada dominasi satu golongan terhadap yang lain. Kharisma persekutuan adalah harta kekayaan Gereja yang tak terperikan. Persekutuan bisa dipakai untuk melawan budaya egois dan kompetitif negatif. Sementara secara eksternal Gereja Katolik menjalin hubungan dengan Gereja yang lain, agama lain dan dengan dunia modern.²³³

3.1.2. Gereja Terbuka terhadap misteri Roh

Pembaruan Gereja dengan demikian menyambut kehadiran Allah yang tak tersangka-sangka dan terpesona. Dengan melakukan pembaruan, gereja mendapat kejutan-kejutan dari Allah. Dengan Metode kontemplatif, kita memindai dan mengenal Allah, serta berkomunikasi dengan Allah. Membuka diri dan berkomunikasi dengan Allah berarti kita mengambil jarak terhadap kesibukan dan berdiri dihadapannya seraya berpasrah. Dengan tingkat kesibukan yang tinggi serta merta membuat pemimpin pastoral dan umat menjadi asing dengan dirinya sendiri, terutama menjauhkan diri dari Allah.²³⁴ Perlawanan terhadap alienasi diri hanya mungkin bila para petugas pastoral Gereja menyambut kehadiran

²³³Aleks Armanjaya, Georg Kirchberger (penterj.), Horst G. Pochlmann, *Pembaruan Bersumberkan Tradisi: Potret 6 teolog Besar Katolik Abad ini* (Ende: Nusa Indah, 1998), p. 5.

²³⁴Ibid. p. 23.

Allah dengan imajinatif kreatif para penyair, dan seniman. Pemikir bermimpi yang karuniai oleh Roh Allah.

3.2. Budaya tanding budaya komunikasi.

Perekrutan petugas pastoral Gereja Katolik NTT jelas memberikan kesempatan kepada Gereja Katolik untuk memilih dan membuka diri dan membangun komunikasi dengan memperhatikan beberapa entry point.²³⁵

Pertama, harus diingat bahwa pelaku utama pembaharuan adalah Allah sendiri, yang menciptakan kita kembali kepada Roh-PuteraNya. Para petugas hendak bergerak memberi kesaksian tentang hidup baru di dalam Yesus oleh kasih tanpa pamrih. Kedua, tahapan pembaruan menuju spiritualitas yang mendasar dan menyeluruh. Pembatinaan yang memantulkan kebaruan hidup kita di dalam Roh Yesus, cara kita yang baru dalam hal ihwal menjadi Gereja.

Ketiga, suatu pembaruan dalam keterlibatan misioner, sambil melaksanakan misi Gereja dengan semangat dan roh yang diperbarui, dalam interaktif yang kreatif dengan realitas-realitas rahasia. Keempat, suatu pembaruan yang menghormati tradisi, namun cukup berani untuk merangkul sebuah masa depan yang bertumbuh dalam kesetiaan yang kreatif terhadap tradisi yang bersangkutan. Kelima, pembaruan yang menyanggumkan kita untuk berani menceritakan kisah Yesus dan memaklumkan karunia hidup baru yang Ia limpahkan kepada dunia kita di Asia, yang serempak memiliki sisi terang dan bayang-bayang. Keenam, pembaharuan itu mesti berdasarkan kondisi kemanusiaan kita, tidak hanya pertobatan budi dan hati, tetapi juga sebuah membalikan atas berbagai struktur dalamnya orang-orang yang dipinggirkan oleh masyarakat mendapat perhatian dan ditemani.

3.2.1. Mengubah Orientasi Pastoral kita

Derap pembangunan masyarakat ikut membentuk mentalitas dan orientasi masyarakat. Pembentukan karakter demikian dapat terjadi baik secara pribadi maupun secara kelompok. Geliat pertumbuhan ekonomi,

²³⁵ Ibid. p. 22.

sosial, budaya, politik, dan agama secara langsung maupun tidak langsung ikut membentuk karakter petugas pastoral Gereja di NTT. Secara masif kita telah melihat di depan bahwa corak masyarakat NTT ikut terbelenggu oleh orientasi masyarakat yang telah sungguh berubah, yang berjalan seiring dengan perubahan di aras nasional. Krisis keteladanan kepemimpinan, budaya kekerasan, Ancaman HIV/AIDS, kejahatan kolektif, korupsi di tingkat birokrat pemerintah, Orientasi kapitalis yang mengukur nilai guna sebagai nilai prinsip yang menurunkan nilai kemanusiaan ke batas ekonomi untung-rugi.

Bercermin pada gejala dan perubahan orientasi demikian, Gereja tidak bisa diam dan berpangku tangan. Pada titik inilah Gereja terpanggil untuk bersuara dan melihat kembali *blue print* model pembinaan dan arah pastoral yang selama ini sadar atau tidak sadar ikut menyumbangkan dampak negatif dari seluruh proses pembangunan yang sedang terjadi di depan mata kita. Pada akhirnya kita tidak mungkin membiarkan generasi muda Gereja Katolik terjerembab dalam kebobrokan dan mentalitas kapitalis merasuk dalam jiwa mereka.

3.2.1.1. Budaya Tanding: Bentuk Perlawanan Pastoral

Gereja Katolik telah mencatat dengan tinta emas, bagaimana seorang Thomas More tidak bergeming kepada tawaran untuk mengikuti kehendak Raja Henry VIII untuk melawan Otoritas Paus dan Hirarki Gereja Roma Katolik. Perlawanan More bukan sekedar formalitas subyektif bahwa Raja melawan Pemimpin Gereja Katolik dan bahwa More sendiri turut tidak tunduk pada pemimpin tertinggi di negerinya. Ini bukan pula soal dia mau tampil beda saja, melainkan ini soal prinsip fundamental etis yang menghidupi norma masyarakat sepanjang sejarah Inggris. Perlawanan politik etis itu *dimainkan* oleh Thomas More untuk menunjukkan keutuhan moral kristiani. Dia ada dalam sistim tetapi tidak tunduk pada sistim yang *serong*, tidak beretika. Keberanian menyerahkan jiwa raga Thomas More demi nilai tertinggi demikian adalah spirit budaya perlawanan tenaga pastoral jaman sekarang. Tenaga Pastoral membutuhkan *pemantik* More untuk membakar semangat pelayanan pastoral yang sudah mulai *loyo*. Api konteks pastoral kita memang sudah mulai redup namun kita belum terlambat.

3.2.1.2. Menimbang Sejarah *Spirit Pola* Rekrut Agen Pastoral di NTT

Putera-puteri Katolik NTT boleh bangga bahwa sejarah pendidikan di wilayah ini telah *ditoreh* dengan tinta emas oleh para misionaris Katolik asal Belanda, kemudian menyusul tenaga-tenaga pastoral misi SVD asal Jerman, Polandia, Inggris, Philipina, dan Amerika juga Jepang saat masa pendudukan Jepang di Nusantara. Awam-awam Katolik berbakat kala itu di Godok di sekolah-sekolah rakyat dan disemaikan di seminari-seminari. Demi menyiapkan tenaga untuk tukang bangunan, misi mendirikan sekolah-sekolah pertukangan dan bengkel-bengkel misi. Demikianpun untuk menyiapkan tenaga-tenaga guru, misi mendirikan sekolah-sekolah untuk calon guru.²³⁶ Para awam digodok di tapal-tapal kawah *candradimuka* di persemaian misi iman serentak misi kemanusiaan. Dari sana mereka diutus ke seluruh pelosok NTT dan di wilayah nusantara lainnya. *Prestise* yang membanggakan telah dilakukan oleh para misionaris yang mengagumkan itu. Para Misionaris telah membuat sebuah lompatan nilai dan aksi. Mereka telah mengangkat manusia NTT untuk mampu tegak berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan sama saudara di wilayah lain di negeri ini.

Kolonialisme sudah mencengkram bumi nusantara 350 tahun dan menjadikan Jawa dan Sumatra sebagai basis-basis perdagangan sejak abad 16. Demikian kedua wilayah ini sungguh mengalami geliat pembangunan *ala* Belanda Kolonial. Praksis wilayah NTT baru tersentuh sejak pertengahan abad XIX dan baru mulai menemukan performa pembangunan sebenarnya? Putera-puteri terbaik bangsa asal wilayah ini telah merasakan sentuhan tangan Tuhan lewat para misionaris abdi-Nya. Para Misionaris telah menyebar ke wilayah misi di Residen Kupang, yang kemudian kita kenal dengan NTT setelah terbentuk menjadi Propinsi. Peningkatan drastis tenaga misionaris terjadi antara tahun 1911 sampai dengan tahun 1939 yakni 222 orang. Kehadiran para misionaris telah

²³⁶ Bdk, Edu Jebarus, *Sejarah Persekolahan di Flores* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2008)

berdampak signifikan, sebuah proses untuk menciptakan NTT sebagai sebuah masyarakat modern dan Kristen.²³⁷

4. REFLEKSI KRITIS: PERAN STRATEGIS GEREJA KATOLIK DI NTT SEBAGAI BUDAYA TANDING

Kalau kita berhitung sejak hari kemerdekaan Indonesia maka negara Indonesia sudah memasuki usia 73 tahun. Kalau kita hitung sejak tahun 1961, kala Gereja Katolik di Indonesia mendapat *Acta Apostolicae Sedis* mengenai Hirarki Gereja Katolik di Indonesia, maka sudah 51 tahun usia hirarki Gereja Katolik Indonesia. Romo Yohanes Petrus Nicolaus Sanders diutus ke Larantuka pada tahun 1860²³⁸. Romo Sanders adalah Misionaris Hindia Belanda pertama di Nusa Tenggara, Larantuka. Dengan demikian Gereja Katolik dalam masa Hindia Belanda sudah berusia 152 tahun. Demikian rentang waktu yang cukup panjang untuk membangun Gereja yang berbasis lokal Indonesia. Untuk itu kita bisa ajukan pertanyaan kepada pemerintah Propinsi NTT dan pemerintah kabupaten/kota, Sudah sejauh mana Anda telah mengisi kemerdekaan dan mengisi pelayanan jemaat sesuai dengan cita-cita Politik pendiri bangsa.

Pengaruh Misi Katolik sudah berurat akar dalam kalbu putera-puteri NTT. Misi Katolik sudah memberikan pelayanan-pelayanan terbaik baik di darat, laut, maupun di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Misi telah mengangkat harkat dan martabat manusia NTT. Praktis Gereja hampir mengambil semua peran publik pemerintah untuk turut membuat masyarakat sejahtera. Kita bisa maklumi karena pada saat itu negara dan bangsa masih kesulitan untuk membiayai pembangunan. Para tenaga misionaris telah mengabdikan diri dan hidup mereka untuk putera-puteri Tuhan di persada NTT dan Indonesia pada umumnya. Betapa Gereja telah menanamkan benih cinta kasih melalui pelayanan dan pengabdian tanpa pamri. Jika Gereja

²³⁷ Karel Steenbrink, *Orang-orang Katolik di Indonesia 1808-1942: Pertumbuhan yang spektakuler dari Minoritas yang percaya diri 1903-1942* Jilid I (Maumere: Penerbit Ledalero, 2006), p. 135-142.

²³⁸ Karel Steenbrink, *Orang-orang Katolik di Indonesia 1808-1942: Suatu Pemulihan yang bersahaja 1808-1909* Jilid II (Maumere: Penerbit Ledalero, 2006), p. 133.

diibaratkan dengan orang tua, maka sudah saatnya generasi sekarang harus bersyukur dan merayakannya dengan melanjutkan karya mereka. Gereja bisa boleh *mengaso* dan menikmati hasil-hasil bumi yang telah mereka semai dan taburkan. Namun Gereja sebagai bunda tidak pernah tertidur apalagi membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri.²³⁹ Masa-masa itu telah lewat. Gereja telah menyerahkan tongkat estafet ke tangan pemerintah. Karena pemerintahlah yang mempunyai tanggung jawab untuk melayani wilayah-wilayah publik dimana harus dikelola dan ditata untuk kesejahteraan masyarakat. Gereja kembali ke fungsi misi untukewartakan iman Kristen dan karya keselamatan Allah.

Sementara itu realitas grafik kecendrungan kegagalan tatanan hidup ditandai oleh mentalitas anarkis dan budaya kekerasan mulai meningkat, menyebar bagaikan teror di tengah masyarakat. Pemerintah yang tadinya diharapkan mengelolah wilayah publik dan tatakelolah pemerintah yang baik dan benar ternyata turut tenggelam dalam wabah korupsi, kolusi dan nepotisme yang menggurita. Gereja tentu tidak bisa *dipaksa* lagi bernostalgia untuk kembali ke medan karya tahun-tahun 60/70an untuk membantu masyarakat.

Akhirnya toh Gereja pada galibnya, senantiasa menemani putera dan puterinya dalam hidup di tengah masyarakat (GS.1). Oleh karena itu Gereja tetap membuat pilihan-pilihan strategis agar keadaan tak teratur demikian dapat diatasi sesuai porsinya. Ingat bahwa Gereja katolik dalam ajaran sosialnya tidak memberikan solusi teknis namun dengan pertimbangan moral mendorong perubahan masyarakat kearah yang lebih baik.

5. PENUTUP: BUDAYA TANDING YANG DICITA-CITAKAN

Yang dibutuhkan adalah tahapan-tahapan sesuai kemampuan yang ada baik secara internal maupun eksternal. Secara internal mempunyai gerak ke dalam meliputi: Pertama, Gereja harus sanggup menyiapkan dan mendorong para petugas pastoral untuk dapat mengambil peran sesuai dengan kesanggupannya. Gereja sebagai sebuah

²³⁹ Bdk. Paus Yohanes paulus II, *Lumen Gentium*, terj. R. Hardawiryana, Jakarta: Departemen Dokumen dan Penerangan KWI. 2002.

l lembaga harus sadar memainkan peran yang lebih aktif. Gereja dalam 10 atau 20 tahun terakhir hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada awam-awam berbakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi baik dalam maupun luar negeri seperti tahun awal kemerdekaan. Karena hampir semua keuskupan di Indonesia khususnya di Nusatenggara masih memberikan prioritas mengirim para imam untuk melanjutkan studi ke luar negeri untuk keperluan formasi internal dan kebutuhan lembaga-lembaga pendidikan yang bernaung dibawa keuskupannya. Kedua, dalam melakukan pendampingan advokasi dan mediasi, Gereja harus menyiapkan tenaga-tenaga yang profesionalitas dan siap bekerja untuk memperjuangkan budaya "Pro Life" etis, moral dan kejujuran sebab sudah sangat sulit kita menemukan para profesionalitas publik yang benar-benar terbebas dari gurita konspirasi dengan penguasa demi keuntungan pribadi. Ketiga, Gereja sebagai lembaga harus berani memberikan kepercayaan kepada awam profesional untuk mengambil peran dalam pendidikan yang bercirikan 'Katolik' dibawa pendampingan Kementerian Agama RI. Ad intern, publik Katolik mempunyai hak yang sama ketika ruang itu diberikan oleh Negara. Departemen milik Negara inilah yang menyipkan anggaran untuk pendirian Lembaga Pendidikan Katolik yang dibiayai Negara. Namun sampai dengan saat ini Gereja secara Hirarkis belum mengambil sikap yang jelas. Kenapa kita masih mencurigai maksud baik penyelenggara Negara, toh selama belum terbukti ada upaya pelemahan Negara terhadap lembaga Katolik. Keempat Gereja sebagai hirarkis hendaknya memperhatikan distingsi hirarki kepemimpinan agar dapat memberi ruang yang luas lagi proporsional kepada tenaga-tenaga pastoral tak tertahbis dan yang bukan rohaniwan-rohaniwati untuk terlibat aktif dalam hidup menggereja dan memasyarakat. Dengan demikian mengurangi kesenjangan dan jarak antara hirarkis-umat. Justru pola piramidal yang kaku itu dapat menutup visi dialogal yang menjadi cita-cita bersama.

Secara eksternal Gereja sebagai salah satu pemimpin publik mempunyai alasan demi memainkan peran konstruktif, pertama, Gereja harus berani memainkan peran profetisnya untuk berani berkata benar dan lantang menyuarakan pembelaan kepada hak-hak orang kecil yang terpinggirkan. Kedua, Gereja hendaknya terlibat secara aktif mengirim

'duta-duta' Gereja untuk melakukan lobi-lobi pro kebijakan rakyat. Diantaranya melakukan sosialisai pemilu atau undang-undang yang *sensitif* berpengaruh pada publik. Dengan demikian Gereja memberikan pendidikan hukum dan pendidikan politik kepada masyarakat luas dilintas batas sosial, ekonomi, politik maupun agama. Ketiga, Gereja harus berani mengambil jarak dengan penguasa. Sekian sering publik melihat dengan mata telanjang pimpinan Gereja dan pemerintah "bermesrah" di ruang publik. Pilihan sikap ini mengandung resiko internal, karena Gereja akan *takut* bersuara keras jika oknum penguasa melakukan pelanggaran terhadap martabat pribadi manusia dan lingkungan hidup. Hal demikian bisa saja dimungkinkan karena kedekatan emosional dalam relasi personal. Mungkin Gereja akan bersuara, namun sayang hanya seperti macam ompong. Tak punya arti apa-apa bagi perubahan. Thomas Morus adalah Roh Perubahan itu sendiri ketika Gereja mengambil sikap melawan perubahan yang mencelakakan publik. Inilah keyakinan dan konsistensi personal yang mengagumkan bagi agen pastoral masa kini.